



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



DINAS PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta dapat diselesaikan tepat pada waktunya.



Penyusunan LKIP Dinas Gulkarmat merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Gulkarmat atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Gulkarmat dalam melaksanakan kewajiban pelayanannya.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai hasil pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Gulkarmat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 30 Januari 2023  
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran  
dan Penyelamatan



Drs. Satriadi Gunawan, M.Si  
NIP. 197111181991011001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi .....	1
1.3 Fungsi dan Tugas .....	4
1.4 Sumber Daya Manusia.....	4
1.5 Sarana dan Prasarana .....	6
1.6 Aset Bangunan.....	8
1.7 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	11
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	14
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022.....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>19</b>
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	19
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	42
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022 .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran .....	48
4.3 Tindak Lanjut.....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kendaraan Dinas Operasional .....	6
Tabel 1. 2 Jumlah dan Status aset Pos dan Sektor .....	8
Tabel 2. 1 Target Sasaran Strategis pada Dokumen RENSTRA Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2022 .....	14
Tabel 2. 2 Target Sasaran Strategis pada Draft Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2022 .....	14
Tabel 2. 3 Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2022 .....	15
Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	18
Tabel 3. 1 Interpretasi Capaian Kinerja Sasaran .....	20
Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	21
Tabel 3. 3 Tabel Capaian Indikator Kinerja Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran Tahun 2018-2022 .....	23
Tabel 3. 4 Realisasi Tingkat Kesiapsiagaan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.....	26
Tabel 3. 5 Tabel Capaian Indikator Kinerja Tingkat kesiapsiagaan layanan penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan Tahun 2018-2022.....	27
Tabel 3. 6 Perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran .....	31
Tabel 3. 7 Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2018-2022 .....	31
Tabel 3. 8 Realisasi KSD 39 Tahun 2022 Disgulkarmat.....	33
Tabel 3. 9 Realisasi KSD 61 Tahun 2022 Disgulkarmat.....	34
Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Tahun 2018-2022 .....	41
Tabel 3. 11 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Realisasi Anggaran tahun 2022 .....	43
Tabel 3. 12 Perbandingan Anggaran pada APBD TA 2022 dengan APBD-P TA 2022 .....	44
Tabel 3. 13 Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian IKU .....	45
Tabel 3. 14 Analisis Penggunaan Sumber Daya .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan .....	3
Gambar 1. 2 Tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan .....	4
Gambar 1. 3 Proporsi SDM Dinas Disgulkarmat .....	5
Gambar 1. 4 ASN Disgulkarmat Berdasarkan Usia.....	5
Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Pendidikan .....	6
Gambar 1. 6 Rasio Kantor Sektor terhadap Jumlah Kecamatan .....	9
Gambar 1. 7 Rasio Pos terhadap Jumlah Kelurahan.....	9
Gambar 2. 1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2017-2022 dan Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022.....	12
Gambar 3. 1 Grafik Trend Ketercapaian Layanan Response time kebakaran (15 menit) Tahun 2018-2022.....	24
Gambar 3. 2 Grafik Frekuensi Kebakaran DKI Jakarta Tahun 2017-2022 .....	25
Gambar 3. 3 Sosialisasi melalui pengeras suara rumah ibadah ibadah.....	30
Gambar 3. 4 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Disgulkarmat Tahun 2022 Triwulan 1-4.....	40

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Dinas Gulkarmat termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Laporan ini disusun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 memiliki dua fungsi yaitu (1) sebagai laporan pertanggung jawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan dan (2) sebagai informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yaitu **Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya**, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu **Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan**. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran perangkat daerah maka akan lebih jelas Langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. LKIP menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022.

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan peran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tugas fungsinya. Pengukuran capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis, 8 (delapan) sasaran khusus, dan 4 (empat) sasaran operasional. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis yang menunjang ketercapaian kinerja tersebut berikut keterkaitan antara satu indikator kinerja dengan indikator kinerja lainnya. Perjanjian Kinerja dari sasaran strategis yang merupakan tujuan dan sasaran perangkat daerah diambil dari Draft Perubahan Renstra 2017-2022 yang secara keabsahannya belum memiliki

dasar hukum dikarenakan RPJMD Perubahan 2017-2022 juga belum disahkan. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat capaian yang Sangat Tinggi dengan capaian rata-rata sasaran strategis mencapai 104,08% sebagaimana tabel berikut

### Capaian Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Strategis</b>					
1	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	jiwa/kejadian	7,1	5	130%
2	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	skor	6,2	6,77	109%
3	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan	indeks	1,9	2,54	134%
4	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran	persen	100	99,8	99,8%
5	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	persen	91	99,48	109%
6	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan pengurangan risiko bencana daerah (67)	persen	100	100	100%
7	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	persen	100	100	100%
8	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	persen	100	100	100%
9	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	persen	100	100	100%
	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	persen	100	100	100%
<b>Sasaran Khusus</b>					
10	Persentase bangunan gedung terinspeksi dan mendapatkan rekomendasi teknis	Persen	100	100	100%
11	Opini laporan Keuangan	Predikat	(3) WTP	(3) WTP	100%
12	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen	100	100	100%
13	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persen	100	100	100%
14	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Predikat	AA (91)	AA (97,11)	107%
15	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	Nilai	95	95,18	100%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
16	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	Persen	100	100	100%
17	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Persen	100	100	100%
<b>Sasaran Operasional</b>					
18	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%
19	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100%
20	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,50	89,69	101%
21	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%

Dari tabel diatas dapat terlihat, dari 21 Indikator Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 hanya ada 1 Indikator Kinerja yang tidak mencapai target, yaitu pada Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Persentase Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran dengan target 100% dan Realisasi pada tahun 2022 adalah 99,8%. Permasalahan yang menyebabkan Indikator Kinerja tersebut tidak tercapai adalah karena kurangnya kesiapan operasional petugas pemadam kebakaran dalam mencapai response time 15 menit dan juga kesiapan petugas untuk segera memadamkan kebakaran secepat mungkin. Semakin cepat response time (waktu yg diperlukan dari terima laporan sampai dengan unit pertama sampai ke lokasi kejadian kebakaran) maka semakin cepat pula langkah antisipasi yang bisa dilakukan sehingga kebakaran tidak meluas dan meminimalisir warga yang terdampak kebakaran.

Karena masih adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada anggaran dilakukan penyempurnaan dan ada beberapa kegiatan yang terkena Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait Evaluasi APBD Provinsi DKI Jakarta, hal tersebut menyebabkan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mengalami pengurangan sebesar 13% untuk menyelesaikan target indikator kinerja utama di tahun 2022. Dengan sisa anggaran tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mampu mencapai rata-rata target indikator kinerja sebesar 104,08%. Oleh karena itu seluruh sisa anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan sebagai efisiensi.

Berdasarkan data anggaran, terlihat bahwa pendanaan pelayanan atau pelaksanaan tugas fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan selama kurun waktu 2018-2022 sangat fluktuatif. Setelah sempat naik di tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 1.363.627.156.747 dari tahun 2018 dengan anggaran

Rp 1.115.804.326.993 dukungan pendanaan yang diperoleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menurun pada tahun 2020 sebesar Rp 679.043.848.550. Menurunnya anggaran ini akibat adanya refofusing perihal pandemi covid-19 yang terjadi di provinsi DKI Jakarta. Sementara di Tahun 2021 porsi anggaran bertambah kembali menjadi Rp. 1.023.831.335.373,- seiring dengan adanya perbaikan ekonomi, lalu pada tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp. 1.197.894.830.275 dengan penyerapan pada tahun 2022 mencapai 95,51%.

Secara keseluruhan tugas fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik dengan beberapa prestasi diantaranya, mempertahankan penurunan frekuensi kebakaran dengan jumlah frekuensi kebakaran di Tahun 2022 sebanyak 1691 kejadian. Selain itu dalam menghadapi berbagai kendala pelaksanaan kegiatan yang dibatasi oleh anggaran dan juga dilarangnya proses berkumpul dengan masyarakat sampai pertengahan tahun, maka muncullah inovasi-inovasi pelaksanaan kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat pada proses sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan melalui pengeras suara tempat ibadah dan hal tersebut berjalan pada 36.600 titik di seluruh DKI Jakarta.

Penyusunan rencana kinerja Tahun 2022 masih belum sesuai dan selaras dengan Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2022 sehingga diperlukan penyelarasan Renstra dengan sasaran yang diharapkan dan mengikuti kaidah perencanaan kinerja yang ada.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan capaian target sasaran kurun waktu Tahun Anggaran 2022 dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan disusunnya LKIP adalah untuk :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.
3. Hasil evaluasi akan dijadikan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

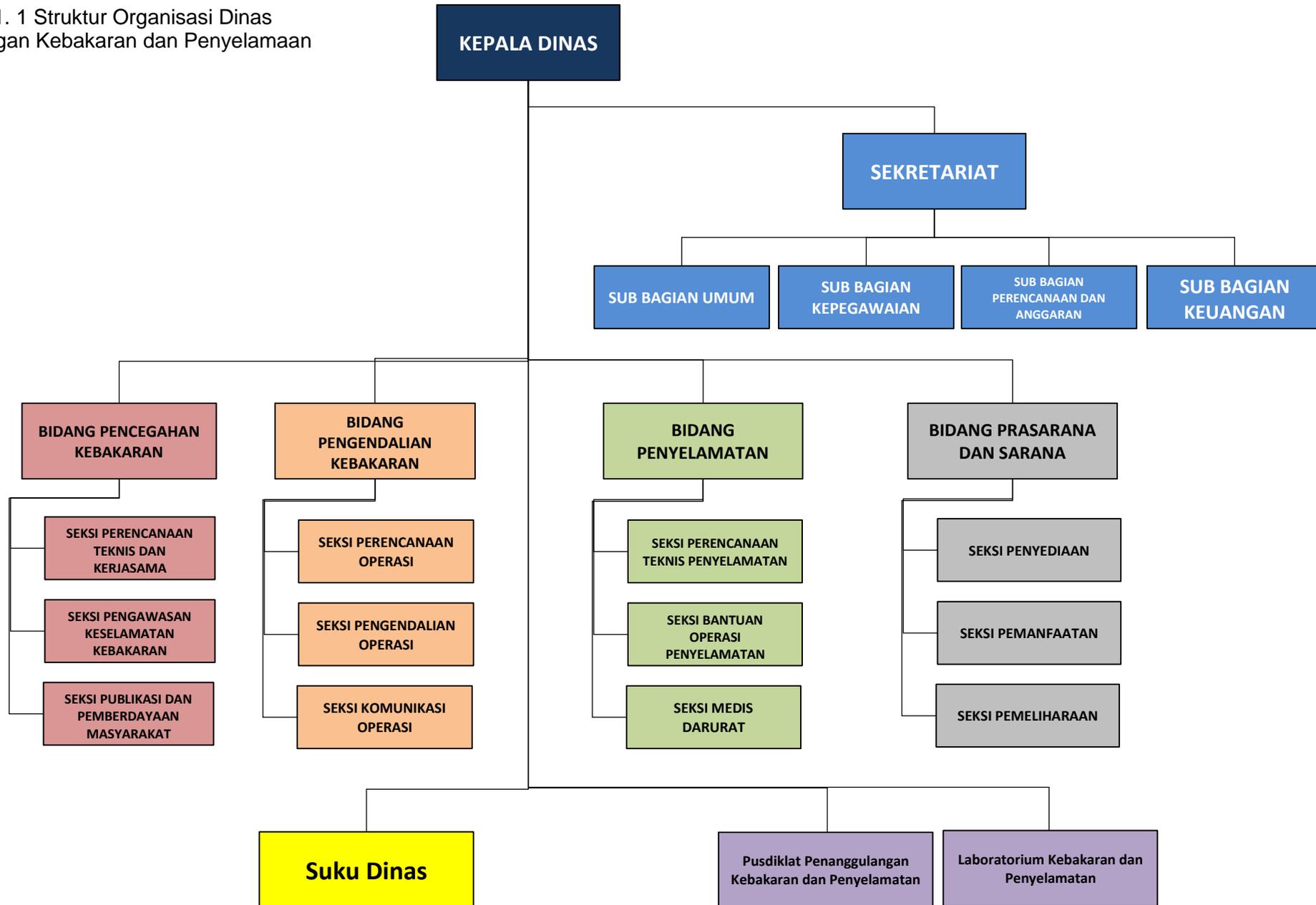
#### 1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Struktur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas Kepala Dinas dan dibantu oleh—:

1. Sekretariat Dinas
2. Bidang Pencegahan Kebakaran
3. Bidang Pengendalian Kebakaran
4. Bidang Penyelamatan
5. Bidang Prasana dan Sarana

6. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
12. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas  
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan



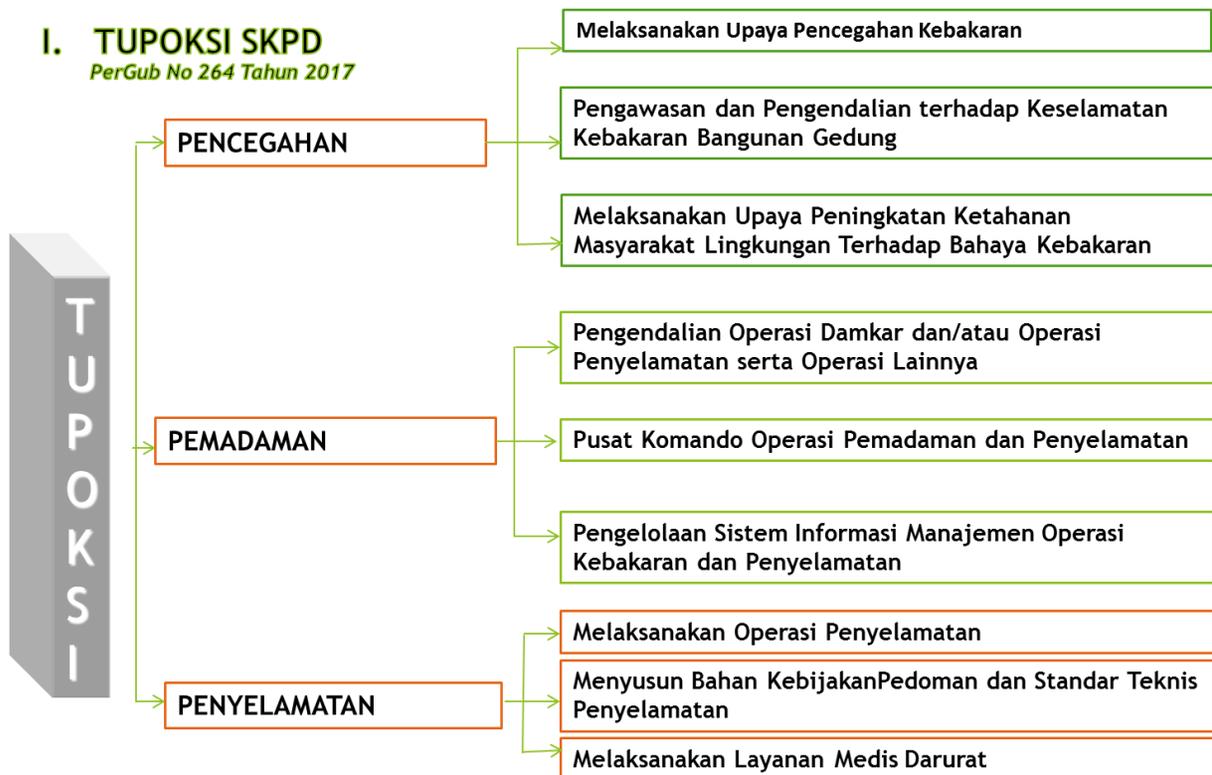
### 1.3 Fungsi dan Tugas

Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang kebakaran.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana termuat dalam Gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan



### 1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan membutuhkan SDM yang memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Saat ini (per 1 Januari 2023) SDM Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 2.389 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1.753 PJLP (Pengedia Jasa Lepas Perorangan) seperti Gambar 1.3. PJLP merupakan

tenaga kontrak yang direkrut oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai solusi untuk menutup kekurangan jumlah personil damkar dikarenakan masih berlakunya moratorium (penghentian sementara) penerimaan PNS. Jumlah PJLP Pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan cukup besar yaitu 42% dan perlu mendapatkan perhatian dikarenakan tidak adanya ikatan khusus yang menjamin bahwa PJLP tersebut akan tetap bekerja Di Disgulkarmat dalam jangka panjang sementara skill PJLP terus ditingkatkan melalui diklat.

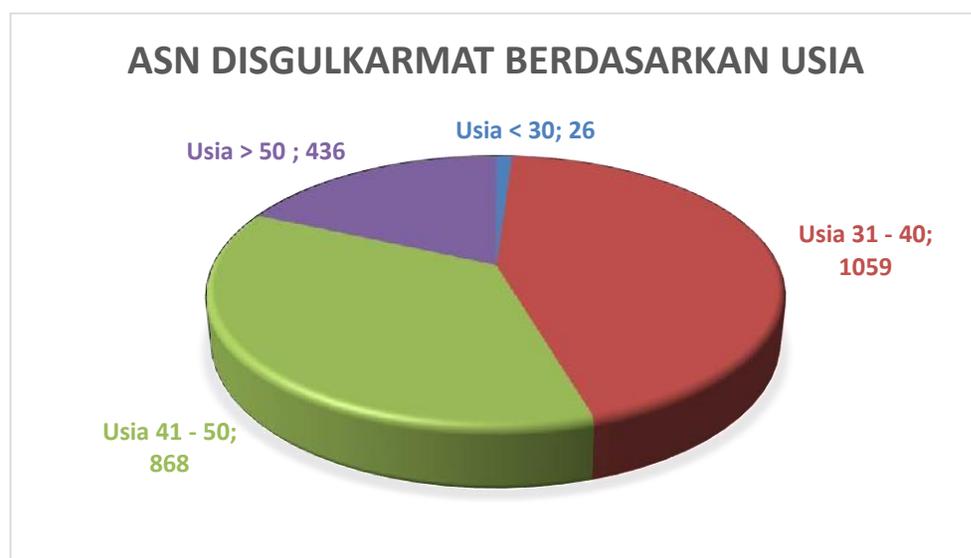
Gambar 1. 3 Proporsi SDM Dinas Disgulkarmat



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 31 Desember 2022

Jika dilihat berdasarkan usia ASN pada Disgulkarmat (Gambar 1.4), usia terbesar ada pada range 31 – 40 Tahun yang merupakan usia produktif dan cukup baik. Namun yang perlu diantisipasi adalah bahwa usia ASN diatas 50 tahun juga cukup besar, hingga perlu adanya rekrutmen pegawai dalam jumlah yang cukup besar dalam lima tahun mendatang

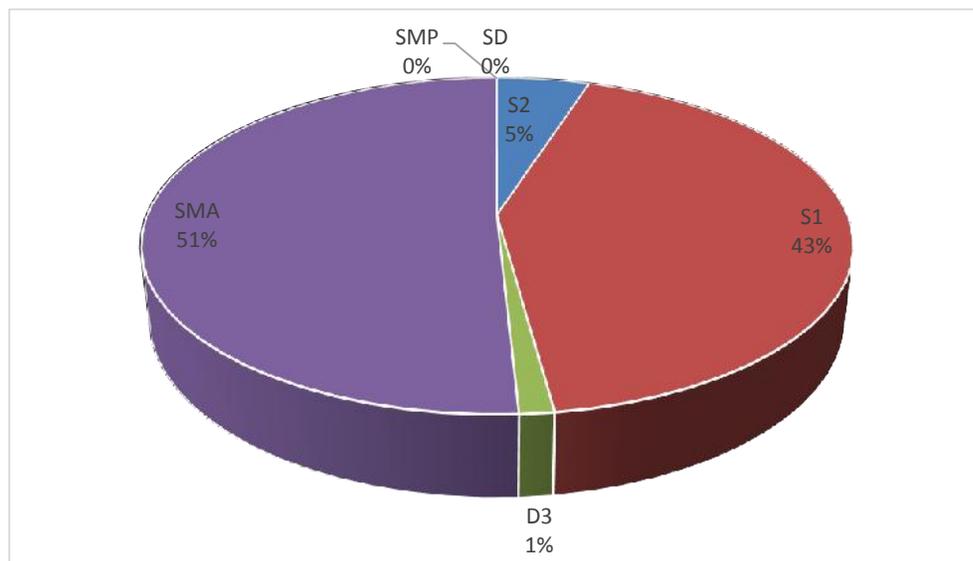
Gambar 1. 4 ASN Disgulkarmat Berdasarkan Usia



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 31 Desember 2022

Jika dilihat berdasarkan pendidikan pegawai, maka mayoritas pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan lulusan SMA yaitu sebanyak 51%. Berdasarkan data di atas pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan lulusan S1 mencapai 43% dari total pegawai. Masih banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan SMA ini menunjukkan bahwa Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan masih memerlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi para pegawai.

Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Pendidikan



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 31 Desember 2022

### 1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki Sarana dan Prasarana berupa kendaraan dinas operasional dan peralatan/perlengkapan. Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Data Kendaraan Dinas Operasional

No	Nama KDO	Jumlah KDO
<b>1.</b>	<b>MOBIL POMPA</b>	<b>228</b>
	Mobil Pompa 10.000 lt	37
	Mobil Pompa 4.000 lt	117
	Mobil Pompa 2.500 lt	74
<b>2.</b>	<b>KENDARAAN OPERASIONAL KARYAWAN</b>	<b>58</b>
	Bus Besar/ Mini Bus	20
	Komando	33
	Mobil Penyuluhan	4
	Mobil investigasi	1

## Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022

<b>3</b>	<b>MOBIL TANGGA</b>	<b>19</b>
	Mobil Tangga 104 Meter	2
	Mobil Tangga 90 Meter	1
	Mobil Tangga 55 Meter	1
	Mobil Tangga 47 Meter	1
	Mobil Tangga 40 Meter	1
	Mobil Tangga 32 Meter	13
<b>4</b>	<b>MOBIL RESCUE &amp; KHUSUS</b>	<b>356</b>
	Mobil Strong Arm	4
	Mobil Submersible	19
	Mobil Smoke Removal	10
	Mobil Fast Attack	10
	Mobil Rapid Response	12
	Mobil Quick Response	78
	Mobil Water Mist	89
	Mobil Hose Retrieval	17
	Mobil Rescue	72
	Mobil Operasional Sektor	33
	Mobil BA	9
	Mobil Heavy foam	1
	Mobil Keb. MRT	1
	Mobil Pengurai ( Dokking )	1
<b>5</b>	<b>MOBIL PENDUKUNG</b>	<b>95</b>
	Mobil Ambulan	12
	Mobil Angkutan Barang	19
	Mobil Medan Berat	10
	Mobil Derek	5
	Unit Pos Pemadam bergerak	5
	Mobil Pendukung lainnya	44
<b>6</b>	<b>SEPEDA MOTOR</b>	<b>329</b>
	Sepeda motor Honda CB 100	98
	Sepeda Motor UPRC	84
	Sepeda Motor GW 250	20
	Sepeda Motor Viar	110
	Motor Cycle	8
	Sepeda pembuka jalan/peliputan	9
	<b>TOTAL KDO</b>	<b>1085</b>

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 31 Desember 2022

## 1.6 Aset Bangunan

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat sangat berorientasi dengan kecepatan waktu penyelesaiannya. Hal tersebut dikarenakan semakin cepat petugas datang ke tempat kejadian kebakaran ataupun penyelamatan maka akan meminimalkan resiko dan dampak akibat bahaya kebakaran atau bencana lainnya baik itu berupa nyawa ataupun harta benda. Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran pasal 33 bahwa dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di tingkat kecamatan dibentuk kantor sektor dan pada tingkat kelurahan dibentuk kantor pos pemadam. Sehingga idealnya di tiap Kecamatan di DKI Jakarta terdapat satu kantor sektor pemadam kebakaran dan di tiap kelurahan terdapat setidaknya satu kantor pos pemadam kebakaran. Pada kenyataannya kondisi ideal tersebut sangat sulit tercapai dikarenakan sulitnya mendapatkan lahan untuk dibangun kantor sektor dan pos di wilayah DKI Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan membuat alternatif solusi yaitu dengan adanya pos Non BMD atau Kepemilikan diluar milik daerah yaitu pos atau lahan yang dimiliki pihak swasta untuk ditempati oleh petugas pemadam untuk berjaga sebagai pos atau dengan menempatkan pos karavan/ pos bergerak, yaitu pos berbentuk mobil yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan penjagaan. Data mengenai aset pos dan sektor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Jumlah dan Status aset Pos dan Sektor

No	Sudin	Status Pos				TOTAL	Status Sektor			
		BMD	Non BMD	Swadaya	Pos Bergerak		BMD	Non BMD	Swadaya	TOTAL
1	Jakarta Pusat	15	1	0	4	20	6	0	0	6
2	Jakarta Utara	24	3	9	1	37	4	0	0	4
3	Jakarta Barat	21	2	5	1	29	8	0	0	8
4	Jakarta Selatan	20	9	1	0	30	5	0	0	5
5	Jakarta Timur	24	2	3	0	29	7	0	0	7
<b>TOTAL</b>		<b>104</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>145</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>

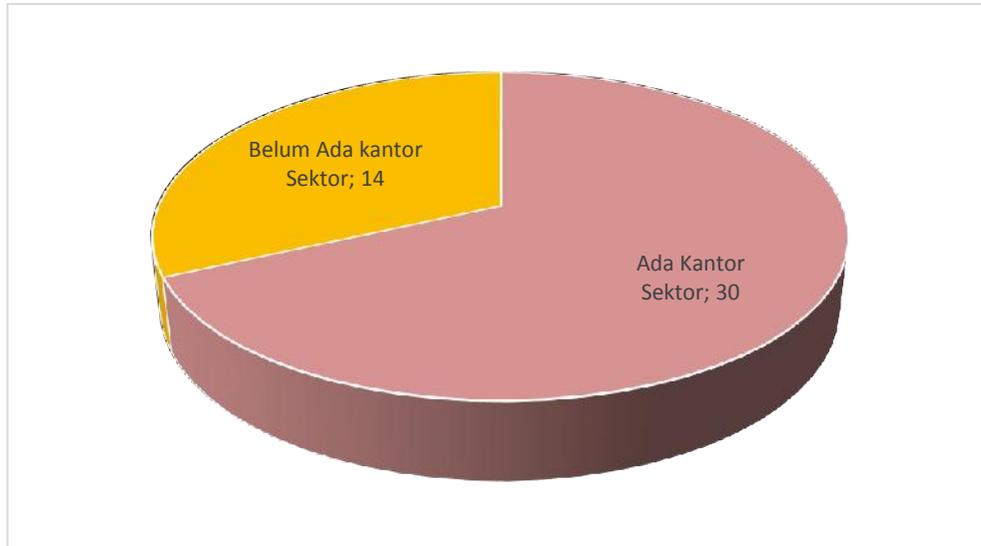
Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 31 Desember 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan saat ini memiliki 145 Pos dan 30 Sektor. Dari 145 Pos yang ada 104 diantaranya adalah BMD/aset, ada juga Pos non-aset/non-BMD ataupun Pos MOU dengan pihak swasta/swadaya masyarakat dan pos bergerak.

Adapun rasio jumlah sektor terhadap jumlah kecamatan seperti dalam gambar 1.6 dimana dari 44 kecamatan di DKI Jakarta terdapat 14 kecamatan yang belum memiliki

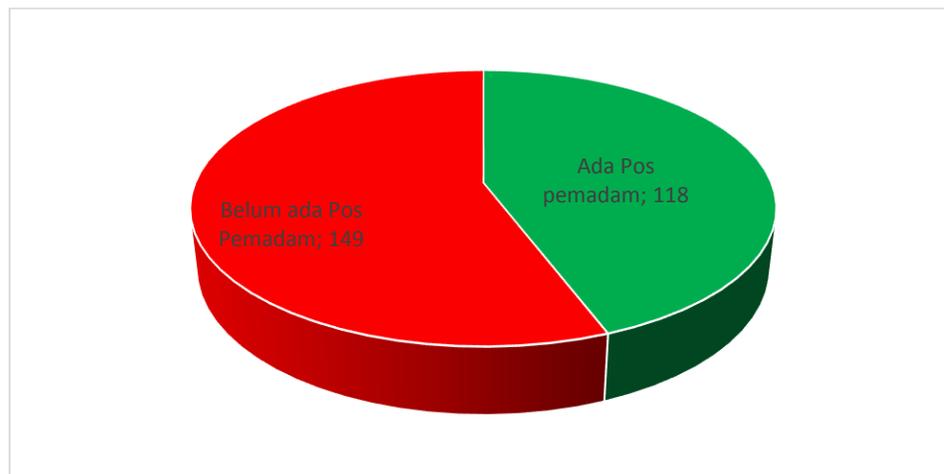
kantor Sektor Pemadam. Sedangkan rasio jumlah Pos dengan kelurahan di DKI Jakarta seperti dalam gambar 1.7 yaitu dari 267 kelurahan di DKI terdapat 118 kelurahan yang telah memiliki pos pemadam kebakaran.

Gambar 1. 6 Rasio Kantor Sektor terhadap Jumlah Kecamatan



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 31 Desember 2022

Gambar 1. 7 Rasio Pos terhadap Jumlah Kelurahan



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 31 Desember 2022

## 1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, Kondisi Keuangan serta sistematika penulisan.

## **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja.**

Pada bab ini berisikan mengenai Perencanaan Strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Didalamnya dijelaskan pula Indikator sasaran serta program dan rencana aksi yang akan dicapai. Ada juga rencana anggaran tahun 2022 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang didalamnya dijelaskan tentang alokasi anggaran untuk pelayanan internal dan alokasi anggaran per sasaran strategis. Lalu perjanjian kinerja tahun 2022 didalamnya dijelaskan perjanjian kinerja awal tahun 2022.

## **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menjelaskan tentang capaian kinerja tahun 2022 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang didalamnya terdapat pengukuran capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu realisasi anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini menjelaskan harapan kepada seluruh unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

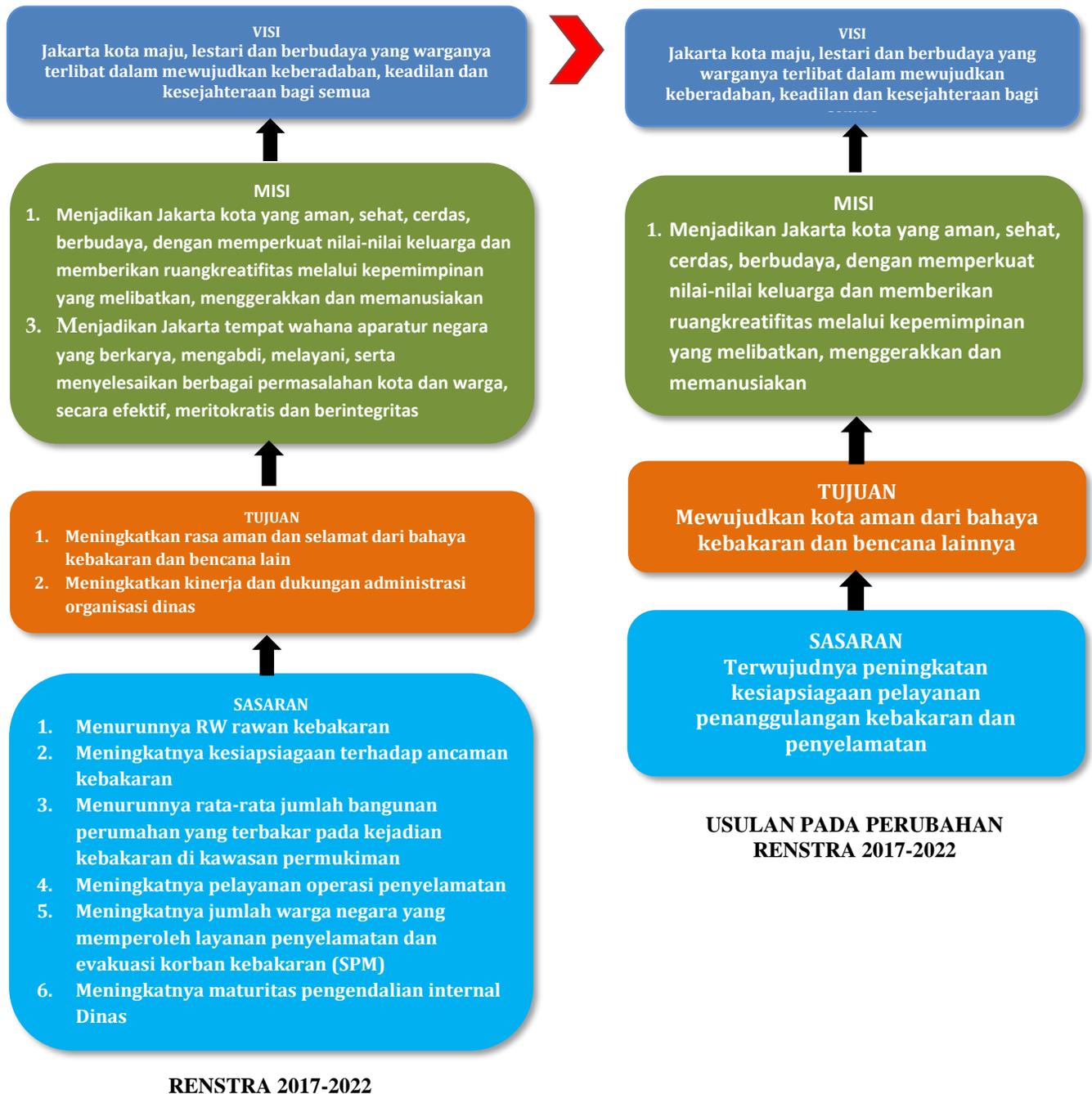
#### 2.1 Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Pada Tahun 2020 terdapat usulan Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2022 dengan beberapa perubahan pada Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara garis besar perubahan keterkaitan antara Visi-Misi-Tujuan-Sasaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan akibat adanya usulan perubahan Renstra 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang menjalankan tugas dan fungsinya pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mendukung satu Misi Gubernur yaitu **Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruangkeaktifitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan**, dengan tujuan Perangkat Daerah **Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya** serta sasaran Perangkat Daerah **Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan**.

## Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022

Gambar 2. 1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2017-2022 dan Rancangan Perubahan RPJMD Tahunin 2017-2022



Sumber: Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2022 dan Draft Perubahan Renstra Tahun 2017-2022

Beberapa hal yang signifikan berubah dengan adanya Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 adalah:

1. Terdapat perubahan tujuan dari dua tujuan menjadi satu yaitu Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Perubahan jumlah tujuan adalah dalam rangka perbaikan cascading kinerja menyesuaikan dengan Program yang ada pada Permendagri 90 Tahun 2019 dimana jumlah program yang menaungi sub urusan kebakaran hanya terdapat satu program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang terdapat pada label provinsi dan kabupaten/kota.

2. Adanya Indikator Tujuan Perangkat Daerah yang jmenjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator tujuan Disgulkarmat adalah Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran. Pada Renstra penetapan tahun 2017-2022 tidak terdapat indicator tujuan perangkat daerah mengikuti Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Terdapat pengurangan sasaran dari enam sasaran menjadi satu sasaran yaitu Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan indikator Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Pengurangan jumlah sasaran adalah dalam rangka perbaikan cascading kinerja menyesuaikan dengan Program yang ada pada Permendagri 90 Tahun 2019 dimana jumlah program yang menaungi sub urusan kebakaran hanya terdapat sartu program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang terdapat pada lebel provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Dokumen Rentra Tahun 2017-2022 maka sasaran pada Disgulkarmat adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1.

## Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022

Tabel 2. 1 Target Sasaran Strategis pada Dokumen RENSTRA Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2022

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Menurunnya jumlah RW rawan kebakaran	Jumlah RW rawan kebakaran	156	131	106	81	56
2	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	Tingkat kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	5.2	5.90	6.59	7.28	8.04
3	Menurunnya rata-rata jumlah bangunan perumahan yang terbakar pada kejadian kebakaran di kawasan permukiman	Rata-rata jumlah perumahan yang terbakar tiap kejadian kebakaran di kawasan permukiman	3,04	2,95	2,86	2,77	2,68
4	Meningkatnya pelayanan operasi penyelamatan	Waktu rata-rata penanganan operasi penyelamatan	120 menit	110 menit	100 menit	90 menit	80 menit
5	Meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	Layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi dalam tingkat waktu tanggap (response time)	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya maturitas pengendalian internal Dinas	Tingkat Maturitas Dinas	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5

Berdasarkan dokumen usulan Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 maka target sasaran strategis berubah menjadi sebagaimana terdapat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Target Sasaran Strategis pada Draft Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Penanggulangan Kebaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan rasa aman dan selamat dari bahaya kebakaran dan bencana lain		Rata-rata jumlah jiwa terdampak pada kejadian kebakaran	7.9	7.7	7.5	7.3	7.1
		Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	Tingkat kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	4.8	5.1	5.4	5.8	6.2

### 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 53/2014, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen

antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang ada. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, agar terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai: (a) wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (b) tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (c) dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta pemberian penghargaan dan sanksi; (d) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah; (e) dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dokumen tersebut berisi indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), keterkaitan (relevant), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat dipantau pelaksanaannya.

Tabel 2. 3 Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2022

NO	Sasaran Kinerja	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
<b>Sasaran Strategis</b>					
1	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	1	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	7,1	Jiwa/Kejadian
2	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	1	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	6,2	Skor
3	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	1	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan	1,9	Indeks
4	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran	100	Persen
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	Persen
6	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan pengurangan risiko bencana daerah (67)	100	Persen

## Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022

NO	Sasaran Kinerja	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	100	Persen
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	100	Persen
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100	persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100	persen
<b>Sasaran Khusus</b>					
10	Meningkatnya kewaspadaan atas bahaya kebakaran pada gedung-gedung bertingkat	1	Persentase bangunan gedung terinspeksi dan mendapatkan rekomendasi teknis	100	Persen
11	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	(3) WTP	Predikat
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	Persen
13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100	Persen
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	AA (91)	Predikat
15	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	95	Nilai
16	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100	Persen
17	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100	Persen

## Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022

NO	Sasaran Kinerja	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
<b>Sasaran Operasional</b>					
16	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	Persen
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen
18	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	88,50	Indeks
19	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	Persen

Perjanjian Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 2.3 terdiri dari:

1. Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari tujuan dan sasaran PD pada Renstra serta Indikator Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 879 Tahun 2021 tentang Penetapan Kategori dan Pembobotan Kegiatan Strategis Daerah.
2. Sasaran Khusus merupakan sasaran khusus yang diharapkan dicapai oleh Perangkat Daerah.
3. Sasaran Operasional merupakan kinerja yang merupakan tindak lanjut arahan gubernur, tindak lanjut aduan masyarakat, survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

#### a. Alokasi Anggaran Untuk Pelayanan Internal

Untuk pelayanan internal pembiayaan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 sebesar Rp 832.365.882.917,- pada Anggaran Penetapan dan Rp 830.411.570.712,- pada Anggaran Perubahan yang terdiri dari dua program yaitu, 1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp 764.915.068.545 pada Anggaran Penetapan dan Rp 769.259.494.297 pada Anggaran Perubahan, 2). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sebesar Rp 67.450.814.372 pada Anggaran Penetapan dan Rp 61.152.076.415 pada Anggaran Perubahan.

**b. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022. Alokasi anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2022 pada anggaran penetapan sebesar Rp **1.377.885.967.189,-**, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 695.762.745.150,- dan Belanja Program (diluar pegawai) sebesar Rp 682.123.222.039,-. Anggaran Pegawai merupakan bagian dari anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Alokasi anggaran berdasarkan sasaran strategis berikut program pendukungnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program Pendukung	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
1	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	545.520.084.272	367.483.259.563
2	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan			
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	764.915.068.545	769.259.494.297
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	67.450.814.372	61.152.076.415
		<b>TOTAL</b>	<b>1.377.885.967.189</b>	<b>1.197.894.830.275</b>

Jumlah Anggaran Belanja **Penetapan** Tahun 2022 : **1.377.885.967.189,-**

Jumlah Anggaran Belanja Program (diluar pegawai) : 682.123.222.039,-

Jumlah Anggaran Belanja Pegawai : 695.762.745.150,-

Jumlah Anggaran Belanja **Perubahan** Tahun 2022 : **1.197.894.830.275,-**

Jumlah Anggaran Belanja Program (diluar pegawai) : 706.100.461.945,-

Jumlah Anggaran Belanja Pegawai : 491.794.368.330,-

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sehingga Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan perlindungan masyarakat dalam Rencana Strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang kemudian diusulkan perubahan menjadi Draft Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (goal) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan juga kinerja lain yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022.

#### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat outcome

atau output realisasi kinerja aktual tahun 2010 dengan target, sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Pengukuran kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Tahun 2017-2022 dan Draft Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2017-2022. Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja Sekretariat, Bidang dan UPT yang disajikan dalam Laporan Kinerja Triwulan yang diperlukan kemudian diolah, dievaluasi dan di analisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran strategik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Formulir yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*Pertormance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*Performance improvement*).

**Tabel 3. 1 Interpretasi Capaian Kinerja Sasaran**

No	Interval Persentase Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	> 90	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

### 3.1.1. Capaian Indikator Sasaran

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis (5 indikator kinerja utama (IKU) dan 4 indikator Kegiatan Strategis Daerah), 8 (delapan) sasaran kusus, dan 4 (empat) sasaran operasional. Pengukuran tingkat capaian kinerja indikator tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sampai dengan akhir tahun 2022 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan seluruh sasaran yang ditetapkan. Semua sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil dicapai dengan sangat tinggi. Adapun hasil

## Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022

pengukuran indikator kinerja tahun 2022 sebagaimana yang tergambar pada Tabel 3.2 berikut

**Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Strategis</b>					
1	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	jiwa/kejadian	7,1	5	130%
2	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	skor	6,2	6,77	109%
3	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan	indeks	1,9	2,54	134%
4	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran	persen	100	99,8	99,8%
5	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	persen	91	99,48	109%
6	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan pengurangan risiko bencana daerah (67)	persen	100	100	100%
7	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	persen	100	100	100%
8	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	persen	100	100	100%
9	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	persen	100	100	100%
	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	persen	100	100	100%
<b>Sasaran Khusus</b>					
10	Persentase bangunan gedung terinspeksi dan mendapatkan rekomendasi teknis	Persen	100	100	100%
11	Opini laporan Keuangan	Predikat	(3) WTP	(3) WTP	100%
12	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen	100	100	100%
13	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persen	100	100	100%
14	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Predikat	AA (91)	AA (97,11)	107%
15	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	Nilai	95	95,18	100%
16	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	Persen	100	100	100%
17	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Persen	100	100	100%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Operasional</b>					
18	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%
19	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100%
20	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,50	89,69	101%
21	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 104,08%, yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian dari seluruh indikator baik indikator dari sasaran strategis, sasaran khusus dan operasional. Dari 21 sasaran tersebut, rata-rata capaian realisasi sasaran dinyatakan SANGAT TINGGI dengan kriteria capaian rata-rata seluruh sasaran sebesar 104,08%.

### 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana data pada Tabel 3.2 dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing IKU, terdiri dari:

**SASARAN 1: Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya**

**IKU 1: Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran**

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurunnya Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran merupakan IKU yang bersumber dari indikator tujuan perangkat daerah pada draft Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2017-2022. IKU ini memiliki capaian yang sangat tinggi sebesar 130%. Realisasi IKU Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran diperoleh dengan menghitung jumlah warga terdampak kebakaran di seluruh wilayah DKI Jakarta dibagi dengan frekuensi kebakaran di DKI Jakarta sepanjang Tahun 2022.

Rata-rata jumlah jiwa terdampak:

$$= \frac{\text{Jumlah warga terdampak kebakaran}}{\text{Jumlah kebakaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{8440 \text{ jiwa}}{1691 \text{ kejadian}} \times 100\% = 5,0 \text{ jiwa/kejadian}$$

**Tabel 3. 3 Tabel Capaian Indikator Kinerja Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran Tahun 2018-2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja														
				2018			2019			2020			2021			2022		
				T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
1	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	jiwa/kejadian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,3	5,62	123,0%	7,1	5	130%

Dari tabel 3.3 diatas dapat terlihat capaian realisasi Indikator Kinerja Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran mengalami kenaikan dan selalu jauh melampaui target yang sudah ditetapkan.

Ketercapaian kinerja tersebut didukung karena kesiapan operasional petugas pemadam kebakaran dalam mencapai response time dan juga kesigapan petugas untuk segera memadamkan kebakaran secepat mungkin. Semakin cepat response time (waktu yg diperlukan dari terima laporan sampai dengan unit pertama sampai ke lokasi kejadian kebakaran) maka semakin cepat pula langkah antisipasi yang bisa dilakukan sehingga kebakaran tidak meluas dan meminimalisir warga yang terdampak kebakaran.

Beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian IKU tersebut adalah:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Salah satu indikator Program tersebut adalah Persentase (pemadaman) penanggulangan kebakaran yang berhasil dimana sebuah operasi pemadaman dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria:

- a. Kejadian kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu <120 menit
- b. Kejadian kebakaran yang memiliki Respond time kurang dari 15 menit
- c. Kejadian kebakaran yang "zero incident" (tidak ada korban jiwa & kecelakaan) pada petugas pemadam kebakaran.

Pada Tahun 2022 terdapat 1691 kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian pemadaman kebakaran yang memenuhi indikator-indikator diatas sebanyak 1687 kejadian sehingga realisasi indikator Persentase (pemadaman) penanggulangan

$$\text{kebakaran yang berhasil sebesar} = \frac{\text{Jumlah kebakaran yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah kebakaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{1687}{1691} \times 100\% = 99,8\%$$

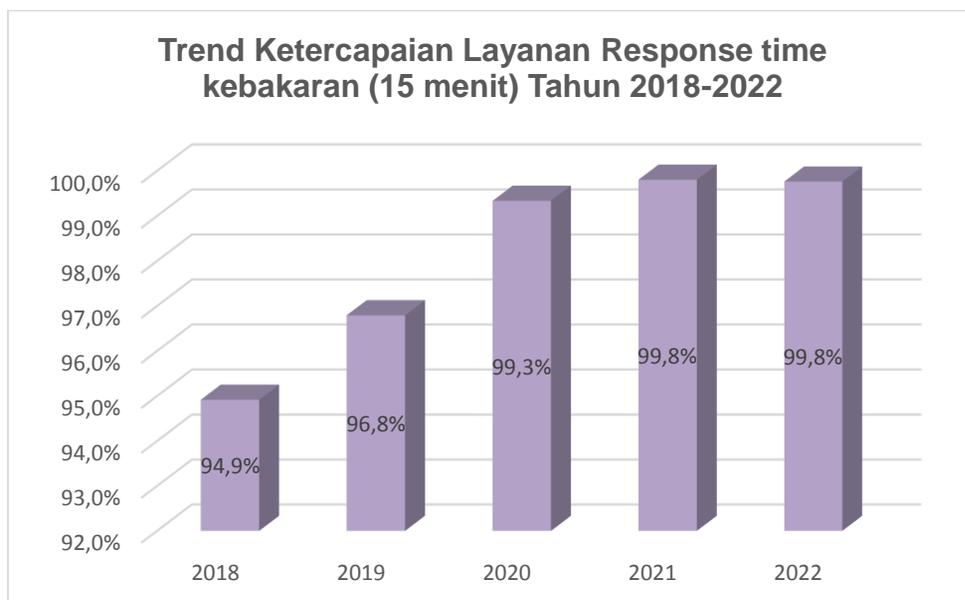
Ketercapaian program tersebut didukung oleh beberapa Sub Kegiatan diantaranya:

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Sub Kegiatan Waktu rata-rata respon (average response time) layanan penanggulangan kebakaran dengan target 15 menit. Kinerja Sub Kegiatan ini memiliki target minimize yang artinya semakin kecil

realisasi semakin baik. Rata-response time adalah menghitung rata-rata response time dari seluruh kejadian kebakaran di DKI Jakarta. Pada Tahun 2022 rata-rata response time DKI Jakarta sebesar 8,8 menit dengan tingkat ketercapaian 170%. Rata-rata Response time DKI Jakarta sudah melampaui dari target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum sebesar 15 menit.

2. Sasaran Strategis - Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu dengan indikator Persentase Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran. Pada Tahun 2022 persentase layanan pemadaman kebakaran yang memenuhi response time 15 menit sebanyak 99,8%.

Gambar 3. 1 Grafik Trend Ketercapaian Layanan Response time kebakaran (15 menit) Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran, 2022

Trend ketercapaian layanan response time kebakaran (15 menit) Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 meningkat dan tetap di tahun 2022, hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan berbagai macam usaha yang dilakukan diantaranya meningkatkan kesiapsiagaan petugas dan juga peningkatan jumlah Pos MoU dengan swasta dan masyarakat sehingga meningkatkan kecepatan waktu respon petugas ke lokasi kebakaran.

Selain ketercapaian layanan response time yang meningkat trend frekuensi kebakaran di DKI Jakarta menunjukkan kinerja positif dengan trend mempertahankan penurunan frekuensi kebakaran pada tahun 2020 yang menurun dari tahun 2019 sebagaimana pada gambar 3.2.

Gambar 3. 2 Grafik Frekuensi Kebakaran DKI Jakarta Tahun 2017-2022



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

Pada Tahun 2022 Frekuensi kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta sebesar 1691 meningkat 10% dari tahun 2021 yang mampu menurunkan frekuensi kebakaran sebesar 23%. Kinerja mempertahankan penurunan frekuensi kebakaran ini perlu dipertahankan agar tingkat kerawanan kebakaran DKI Jakarta dapat terus menurun.

**SASARAN 2:** Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

**IKU 2:** Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

Sasaran terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan IKU yang bersumber dari indikator sasaran perangkat daerah pada draft Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2017-2022. IKU ini memiliki capaian yang sangat tinggi sebesar 109%. Realisasi IKU Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diperoleh dengan:

**Tingkat kesiapsiagaan pelayanan gulkarmat =**  
**indeks kesiapsiagaan SDM + indeks kesiapsiagaan sarana prasarana +**  
**indeks kesiapsiagaan masyarakat**

Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan indeks yang menyatakan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran yang terbagi menjadi 3 (tiga) parameter yaitu kesiapsiagaan SDM aparatur, kesiapsiagaan sarana prasarana, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran. Masing-masing parameter tersebut kemudian dibobotkan berdasarkan kepentingan penanganan pada saat bencana. SDM aparatur memiliki bobot 50%, sarana 20%, prasarana 15% dan masyarakat 15%. Penjelasan realisasi

tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan tahun 2022 terdapat pada tabel 3.4.

**Tabel 3. 4 Realisasi Tingkat Kesiapsiagaan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**

Indikator Sasaran	Parameter	Bobot Parameter	Parameter pengukurannya	Realisasi 2022	
				Parameter	Indeks
Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	SDM	0,50	Persentase petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang kompeten	62,54	3,13
	Sarana	0,20	Persentase mobil pompa dalam kondisi laik (usia dibawah 15 tahun dan kondisi baik) dan	94	1,88
	Prasarana	0,15	Persentase kelurahan yg memiliki pos/sektor	52,81	0,79
	Kesiapsiagaan Masyarakat	0,15	Persentase RW yg sudah tersosialisasi di DKI Jakarta	64,7	0,97
	TOTAL INDEKS KESIAPSIAGAAN PELAYANAN KEBENCANAAN DAERAH (%capaian parameter x Bobot parameter)/10				

Penjelasan perhitungan pada tabel 3.4 adalah sebagai berikut:

**A. Parameter Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur**

- a. Capaian parameter SDM merupakan Persentase rata-rata kompetensi petugas berdasarkan Diklat Damkar 1, Diklat Fire Rescue, dan Medical First Responder.

Pada Tahun 2022 realisasi sebesar 62,54% dengan perhitungan:

$$= \frac{\% \text{mengikuti Damkar 1} + \% \text{mengikuti Fire Rescue} + \% \text{mengikuti MFR}}{3}$$

$$= \frac{100\% + 48,42\% + 39,20\%}{3} = 62,54\%$$

- b. Capaian indeks berdasarkan parameter SDM sebesar 3,13 dengan perhitungan:

$$= \frac{(\% \text{capaian parameter} \times \text{Bobot Parameter})}{10}$$

$$= \frac{62,54 \times 0,50}{10} = 3,13$$

**B. Sarana Prasarana**

- a. Capaian parameter sarana prasarana terdiri dari 2 hal yaitu persentase Kelurahan yang memiliki pos/sektor pemadam dengan capaian 52,81% dengan perhitungan

$$= \frac{\text{Jumlah kelurahan yang memiliki Pos/Sektor}}{\text{Jumlah kelurahan di DKI Jakarta}} \times 100\%$$

$$= \frac{141}{267} \times 100\% = 52,81\%$$

- b. Capaian indeks berdasarkan parameter sarana prasarana Pos/Sektor sebesar 0,79 dengan perhitungan

$$= \frac{(\% \text{capaian parameter} \times \text{Bobot Parameter})}{10}$$

$$= \frac{52,81 \times 0,15}{10} = \mathbf{0,79}$$

- c. Capaian parameter sarana prasarana berdasarkan persentase kelaikan mobil pompa dengan capaian 94% dengan perhitungan

$$= \frac{\text{Jumlah mobil pompa yg laik (usia < 15th dan dapat beroperasi)}}{\text{Jumlah mobil pompa}} \times 100\%$$

$$= \frac{232}{246} \times 100\% = 94\%$$

- d. Capaian indeks berdasarkan parameter sarana prasarana mobil pompa sebesar 1,88 dengan perhitungan

$$= \frac{(\% \text{capaian} \times \text{Bobot SKPD} \times \text{Bobot Parameter})}{10} \times 100\%$$

$$= \frac{94 \times 0,20}{10} = \mathbf{1,88}$$

### C. Kesiapsiagaan Masyarakat

- a. Capaian parameter kesiapsiagaan masyarakat sebesar 64,7% dengan perhitungan

$$= \frac{\text{jumlah RW yang telah dilakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran}}{\text{jumlah RW di DKI Jakarta}}$$

$$= \frac{1774}{2742} = 64,7\%$$

- b. Capaian indeks berdasarkan parameter kesiapsiagaan masyarakat sebesar 0,97

$$= \frac{(\% \text{capaian parameter} \times \text{Bobot Parameter})}{10}$$

$$= \frac{64,7 \times 0,15}{10} = \mathbf{0,97}$$

**Realisasi tingkat kesiapsiagaan layanan penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan = SDM + Sarana Prasarana + Kesiapsiagaan Masyarakat**

$$= 3,13 + (1,88 + 0,79) + 0,97$$

$$= \mathbf{6,77}$$

**Tabel 3. 5 Tabel Capaian Indikator Kinerja Tingkat kesiapsiagaan layanan penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan Tahun 2018-2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja															
				2018			2019			2020			2021			2022			
				T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	
1	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	skor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,8	5,97	102,93%	6,2	6,77	109%

Dari tabel diatas dapat terlihat capaian realisasi Indikator Kinerja Tingkat kesiapsiagaan layanan penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan mengalami kenaikan dan selalu melampaui target yang sudah ditetapkan.

Ketercapaian tingkat kesiapsiagaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan didukung oleh kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang tetap berusaha menjalankan target yang ada ditengah keterbatasan anggaran dan juga keterbatasan ruang gerak karena masih adanya pandemi covid-19 sewaktu awal tahun.

Beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian IKU tersebut adalah:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Salah satu indikator program tersebut adalah tingkat kerawanan kebakaran dengan target pada Tahun 2022 sebesar 3,2. Realisasi tingkat rawan kebakaran sebesar 3,19 dengan capaian 100,31%.

Tingkat rawan kebakaran merupakan indeks yang menyatakan kerawanan kebakaran pada wilayah DKI Jakarta yang dihitung berdasarkan rata-rata tingkat rawan kebakaran kelurahan. Perhitungan tingkat rawan kebakaran didasarkan pada 3 kriteria yaitu:

- 1) frekuensi kebakaran per kelurahan dibagi menjadi 3 range yaitu kerawanan rendah (<1/3 frekuensi kebakaran tertinggi pd kelurahan), sedang (1/3 sampai dengan 2/3 frekuensi tertinggi pada kelurahan), tinggi (>2/3 frekuensi kebakaran tertinggi pd kelurahan) dengan bobot masing-masing 1,2,3.
- 2) persen RW yg telah tersosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dibagi menjadi 3 yaitu rendah (jika >67%RW pada kelurahan tersebut telah tersosialisasi), sedang (jika 33-67% pada kelurahan tersebut telah tersosialisasi), tinggi (jika kurang dari 33% pada kelurahan tersebut telah tersosialisasi) dengan bobot masing-masing 1,2,3.
- 3) Ada tidaknya pos pada kelurahan tersebut diberikan bobot 2 jika ada pos damkar dan 1 jika tidak ada pos.

$$\text{Tingkat Rawan kebakaran DKI Jakarta} = \frac{\sum \text{tingkat rawan kebakaran kelurahan}}{\text{jumlah kelurahan di DKI Jakarta}}$$

Ketercapaian tingkat rawan kebakaran sangat mendukung ketercapaian kesiapsiagaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

2. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2022 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan inovasi, karena pada tahun 2021 kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan anggaran dimatikan akibat pandemi covid-19. Inovasi yang dilakukan adalah melaksanakan kediklatan dengan Hybrid, yaitu secara virtual atau online, dan sebagian kediklatan lainnya yang mengharuskan tatap muka atau offline tetap dilaksanakan dengan mengurangi jumlah peserta. Sementara sub kegiatan tersebut berisi Diklat Fire Rescue dan Diklat Medical First Responder yang sangat

mempengaruhi pencapaian sasaran tingkat kesiapsiagaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan berdasarkan parameter kesiapsiagaan SDM aparatur. Oleh karena itu Dinas Gulkarmat tetap menyelenggarakan Diklat Fire Rescue dan Diklat Medical First Responder dengan jumlah peserta sebanyak 1349 orang untuk kedua diklat tersebut.

3. **KSD 67-** Pengelolaan dan Pengurangan Risiko Bencana Daerah.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dalam pencapaian sasaran kesiapsiagaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan didukung oleh KSD 67 (Pengelolaan dan Pengurangan Risiko Bencana Daerah) dimana terdapat satu rencana aksi yang menjadi tanggung jawab Disgulkarmat yaitu Optimalisasi Pelaksanaan Gerakan Warga Cegah Kebakaran. Terdapat 2 target yang harus dilaksanakan oleh damkar dan tambahan 1 inovasi yang masih terus dilakukan Disgulkarmat disaat masih adanya pandemi covid-19, yaitu:

- a. Tersedianya tim relawan penanggulangan kebakaran di 44 kecamatan. Target ini telah selesai dilaksanakan oleh Disgulkarmat dengan total jumlah relawan yang telah terdata sebanyak 2565 orang.
- b. Tersedianya sarana prasana penanggulangan kebakaran. Target KSD ini telah diselesaikan oleh Disgulkarmat dengan menyusun laporan rekapitulasi sarana prasarana penanggulangan kebakaran yang tersebar di wilayah DKI Jakarta antara lain data kantor sektor/pos pemadam, hidran kota dan hidran mandiri. Data-data tersebut sudah terdapat pada Bab I LKIP ini.
- c. Sosialisasi dan simulasi penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya di Provinsi DKI Jakarta pada tiap triwulan di Tahun 2022. Selama Tahun 2022 Disgulkarmat belum dapat melaksanakan sosialisasi seperti pada umumnya yang mengumpulkan masyarakat untuk dilakukan sosialisasi dikarenakan situasi pandemi yang belum terkendali. Sebagai alternatif sosialisasi maka dilaksanakanlah sosialisasi “woro-woro” melalui pengeras suara tempat ibadah yang berisi himbauan untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran dan langkah-langkah mencegah kebakaran. Pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 36.600 titik sosialisasi woro-woro.

Gambar 3. 3 Sosialisasi melalui pengeras suara rumah ibadah ibadah



**SASARAN 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel**

**IKU 3: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel merupakan sasaran template yang digunakan untuk menaungi program penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:

- a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran  $\geq 80\%$ . Apabila serapan anggaran di bawah  $< 80\%$  maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%).
- b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
- c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran  $\geq 80\%$

Realisasi = (40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%)

2. Serapan Anggaran  $< 80\%$

Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%)

Realisasi indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ada Tahun 2021 mencapai 99,4%.

Rincian perolehan tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.6.

**Tabel 3. 6 Perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Kriteria	BOBOT	Realisasi	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Realisasi Output	50%	100%	49,8%
Realisasi Keuangan	40%	95,5%	40,0%
Realisasi Efisiensi	10%	96,6%	9,7%
<b>TOTAL Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran</b>			<b>99,48%</b>

**Tabel 3. 7 Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2018-2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja														
				2018			2019			2020			2021			2022		
				T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	100	89,39	89%	100	93,8	93,79%	100	99,8	99,78%	91	99,4	109,23%	91	99,48	109%

Dari tabel 3.7 diatas dapat terlihat capaian realisasi Indikator Kinerja Persentase kualitas pelaksanaan anggaran selalu mencapai target yang sudah ditetapkan.

Beberapa Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian IKU tersebut adalah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini memiliki indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan kantor dengan target 4 nilai. Indeks kepuasan pelayanan kantor didapatkan dengan melalui survey kepuasan kepada penerima layanan Kegiatan/Sub Kegiatan dibawah program ini. Survey yang dilakukan mempedomani PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei telah dilaksanakan dengan realisasi indeks kepuasan sebesar 4.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

Program ini memiliki indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan kantor dengan target 4 nilai. Indeks kepuasan pelayanan kantor didapatkan dengan melalui survey kepuasan kepada penerima layanan Kegiatan/Sub Kegiatan dibawah program ini. Survey yang dilakukan mempedomani PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei telah dilaksanakan di Sudin Gulkarmat lima wilayah kota administrasi

dengan hasil perhitungan realisasi indeks kepuasan sebesar 4. Sehingga rata-rata Indeks kepuasan pelayanan kantor sebesar 4.

**SASARAN 4: Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya**

Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)

Sasaran meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD) -45 dimana Disgulkarmat berkontribusi pada rencana aksi Penerbitan Rekomendasi Keselamatan Kebakaran dengan Target: (1) Terbitnya Rekomendasi Keselamatan Kebakaran untuk Rusun Kampung Akuarium Tahap II, (2) Terbitnya Rekomendasi Keselamatan Kebakaran untuk Rusun Kampung Bukit Duri, (3) Terbitnya Rekomendasi Keselamatan Kebakaran untuk Rusun Kampung Kunir, dan (4) Tersedianya Surat Rekomendasi Keselamatan Kebakaran untuk Rusun Jalan Tongkol 10. Seluruh permohonan pelayanan yang masuk melalui DPMPTSP dan didistribusikan ke perangkat daerah teknis sesuai permohonan pelayanan. Khususnya Disgulkarmat dalam hal pelayanan melaksanakan layanan rekomendasi teknis keselamatan kebakaran kepada pengelola Gedung di wilayah DKI Jakarta yang terdapat dalam target KSD-45 tersebut. Seluruh target yang ditetapkan pada KSD-45 ini berhasil dilaksanakan yaitu dengan terbitnya Draft Surat Rekomendasi Keselamatan Kebakaran untuk Rusun Kampung Akuarium Tahap II, Rusun Kampung Bukit Duri, Rusun Kampung Kunir dan Rusun Jalan Tongkol 10 mulai bulan september.

**SASARAN 5: Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta**

Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)

Sasaran Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD) -29 Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko dimana Disgulkarmat berkontribusi pada Terbitnya Rekomendasi Teknis Penataan Kawasan Stasiun. Pada bulan Juni Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sudah mengirimkan Surat Rekomendasi Teknis untuk Penataan Stasiun Kota Tahap 4.

**SASARAN 6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel**

Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD 39)

Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD) -39 Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA dimana Disgulkarmat berkontribusi pada beberapa rencana aksi dengan beberapa target sebagaimana pada Tabel 3.8

**Tabel 3. 8 Realisasi KSD 39 Tahun 2022 Disgulkarmat**

Rencana Aksi	Target	Realisasi	Capaian
Penyusunan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2022) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2022)	Tersusunnya Rancangan Dokumen Perjanjian Kinerja dan SKP Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2022)	100%
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Terlaksananya penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Tersusunnya Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	100%
Penyusunan Rancangan Cascading Kinerja dan Matriks Peran Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2023) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersusunnya Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2023)	Tersusunnya Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2023)	100%
Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW IV 2021 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW IV 2021	1. Tersusunnya Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2021 2. Tersusunnya Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2021	100%
Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW I 2022 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW I 2022	1. Tersusunnya Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2022 2. Tersusunnya Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2022	100%

## Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022

Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW II 2022 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW II 2022	1. Tersusunnya Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2022 2. Tersusunnya Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2022	100%
Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW III 2022 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW III 2022	1. Tersusunnya Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2022 2. Tersusunnya Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2022	100%
Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	1. Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 2. Terinputnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 pada website esr.menpan.go.id	100%

### SASARAN 7: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD 61)

Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD)-61 Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan dimana Disgulkarmat berkontribusi pada beberapa rencana aksi dengan beberpa target sebagaimana pada Tabel 3.9

**Tabel 3. 9 Realisasi KSD 61 Tahun 2022 Disgulkarmat**

Rencana Aksi	Target	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan I Tahun 2022	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan I Tahun 2022 dengan nilai kepuasan eksternal 86,51	100%
	2 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan II Tahun 2022	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan II Tahun 2022 dengan nilai kepuasan eksternal 87,83	100%
	3 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan III Tahun 2022	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan III Tahun 2022 dengan nilai kepuasan eksternal 86,99	100%

## Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022

Rencana Aksi	Target	Realisasi	Capaian
	4 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan IV Tahun 2022	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan IV Tahun 2022 dengan nilai kepuasan eksternal 89,69	100%
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2022	1 TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022.	Adanya berita acara verifikasi inspektorat terkait TLHP APIP yang selesai ditindaklanjuti pada Semester I	100%
	2 TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022.	Adanya berita acara verifikasi inspektorat terkait TLHP APIP yang selesai ditindaklanjuti pada Semester II	100%

### SASARAN 8 : Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana

Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan pengurangan risiko bencana daerah (KSD 67)

Sasaran Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD)-67 Pengelolaan pengurangan risiko bencana daerah dimana Disgulkarmat berkontribusi pada satu rencana aksi, dimana pencapaiannya sudah kami jelaskan pada penjelasan Sasaran ke 2, karena KSD-67 merupakan kegiatan strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis ke 2.

### SASARAN 9: Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Persentase Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran

Sasaran Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar didukung oleh sasaran strategis lainnya yaitu Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya, dimana pencapaiannya sudah kami jelaskan pada penjelasan Sasaran ke 1.

### SASARAN 10: Meningkatnya kewaspadaan atas bahaya kebakaran pada gedung-gedung bertingkat

Persentase bangunan gedung terinspeksi dan mendapatkan rekomendasi teknis

Indikator kinerja Persentase bangunan gedung terinspeksi dan mendapatkan rekomendasi teknis merupakan indikator sasaran khusus yang dikehendaki, dengan penjelasan bahwa gedung yang mendapatkan rekomendasi teknis keselamatan kebakarannya merupakan gedung yang berada di koridor utama utama yaitu Jalan M.H. Thamrin, Jalan Gatot Soebroto dan Jalan Rasuna Said. Realisasi yang dicapai pada indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Gedung di koridor Jalan Sudirman dengan target sebanyak 30 gedung, keseluruhannya telah mendapatkan rekomendasi keselamatan kebakarannya sehingga capaiannya 100%.
- b. Gedung di koridor Jalan Gatot Soebroto dengan target sebanyak 17 gedung, keseluruhannya telah mendapatkan rekomendasi keselamatan kebakarannya sehingga capaiannya 100%
- c. Gedung di koridor Jalan Rasuna Said dengan target sebanyak 16 gedung, keseluruhannya telah mendapatkan rekomendasi keselamatan kebakarannya sehingga capaiannya 100%

**SASARAN 11: Meningkatkan Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Persentase Pemanfaatan E-Order

Target pemanfaatan e-order merupakan target dimana belanja makan minum rapat dan makan minum lapangan wajib dilaksanakan menggunakan e-order dimana pada pemesanan makan minum tersebut diwajibkan kepada UMKM penyedia makanan/minuman. Untuk target pemanfaatan e-order, Disgulkarmat merupakan salah satu perangkat daerah yang mendapatkan pengecualian untuk wajib menggunakan e-order, dikarenakan penyediaan makan-minum lapangan Disgulkarmat merupakan kegiatan tidak terprediksi dan sewaktu-waktu Ketika terjadi kebakaran, sehingga tidak ada penyedia UMKM yang dapat menyanggupi persyaratan Disgulkarmat. Oleh karena itu capaian Disgulkarmat tetap 100%.

**SASARAN 12: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif**

Opini laporan Keuangan

Target indikator sasaran ini merupakan Opini Laporan keuangan daerah mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk mendukung pencapaian WTP maka perangkat daerah berkontribusi dengan menyusun laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Penanggung jawab utama terhadap pencapaian WTP ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

**SASARAN 13: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah**

Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan teknis perhitungan.

- a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah.
- b. Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan Perangkat Daerah. Diskominfo menyusun editorial plan di level Provinsi.
- c. Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfo.
- d. Persentase terpublikasinya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media masa atau media sosial atau media luar ruang.

Capaian indikator implementasi rencana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Disgulkarmat sebesar 100% dimana program yang dibuatkan strateginya yaitu Sosialisasi peraturan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan sosialisasi hasil pendataan dasawisma melalui aplikasi CARIK tentang rumah rawan kebakaran hingga penempelan stiker rumah rawan kebakaran.

**SASARAN 14: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel**

Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022

Predikat SAKIP diperoleh dengan adanya penilaian yang dilakukan oleh inspektorat terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dalam penilaiannya tersebut perangkat daerah diminta untuk melengkapi beberapa kebutuhan dokumen pemeriksaan termasuk Dokumen LKIP Tahun 2021. Pada Tahun 2022 Disgulkarmat memperoleh nilai predikat AKIP sebesar 97,11 jauh melebihi target yaitu 91, sehingga capaian Disgulkarmat pada kinerja ini sebesar 107%, berdasarkan surat dari Inspektorat nomor 3417/PA.02.02 tentang Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.

**SASARAN 15: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur**

Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Nilai PMPRB diperoleh setelah perangkat daerah menginput Lembar Kerja Evaluasi yang telah disiapkan oleh inspektorat dan mengupload bukti dukungannya. Realisasi nilai PMPRB yang diperoleh Disgulkarmat sebesar 95,18 dari target 95 dengan capaian 100%

**SASARAN 16: Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan**

Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi

Indikator Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi dengan menggunakan sistem e-Office diperoleh dengan Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Realisasi Digulkarmat pada kinerja ini adalah 100% keseluruhan Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Kepala Dinas dan telah selesai ditindaklanjuti.

**SASARAN 17: Peningkatan penggunaan e-Produk hukum**

Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal

Indikator Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal diperoleh dengan Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD. Realisasi Digulkarmat

pada kinerja ini adalah 100% karena Disgulkarmat sudah mengajukan 5 produk hukum dengan menggunakan sistem e-Perbal.

#### SASARAN 18: terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Tindak lanjut arahan gubernur adalah kinerja dimana perangkat daerah diperlukan cepat untuk melaksanakan arahan gubernur sesuai dengan permasalahan yang diinginkan. Pada tahun 2022 terdapat dua tindak lanjut arahan gubernur yang menjadi tanggung jawab Disgulkarmat yaitu:

- a. Dinas Gulkarmat lakukan distribusi wilayah secara terencana seperti sebelumnya, sehingga seluruh sumber daya baik manusia dan sarana prasarana agar bisa digunakan untuk penanganan banjir, apabila terjadi peningkatan permukaan air.
- b. Dinas Gulkarmat siapkan SOP untuk penanganan banjir bagi sumber daya Gulkarmat.

Dua arahan gubernur tersebut seluruhnya sudah ditindak lanjuti oleh Disgulkarmat dengan kesiapsiagaan petugas dan sarana prasarana penanganan banjir dan juga dengan penyusunan SOP penanganan banjir bagi Disgulkarmat.

#### SASARAN 19: Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat

Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat

Warga DKI Jakarta dapat melakukan aduan langsung terhadap permasalahan yang ditemui dilingkungannya untuk segera diperbaiki dan dilakukan penanganan oleh perangkat daerah yang membidangi permasalahan tersebut melalui aplikasi *Citizen Relations Management* (CRM). Sistem Cepat Respon Masyarakat merupakan wujud inovasi dalam penyelesaian segala masalah non-darurat di Jakarta. Dalam menangani laporan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk memprioritaskan semua pengaduan, baik yang bobotnya besar maupun kecil. Saat ini, penanganan aduan warga melalui sistem Cepat Respon Masyarakat sudah daring, tiap OPD bisa berkoordinasi dengan OPD lainnya dalam waktu singkat dan laporan masyarakat bisa langsung ditangani melalui aplikasi CRM baik yang berbasis aplikasi web dan aplikasi mobile.

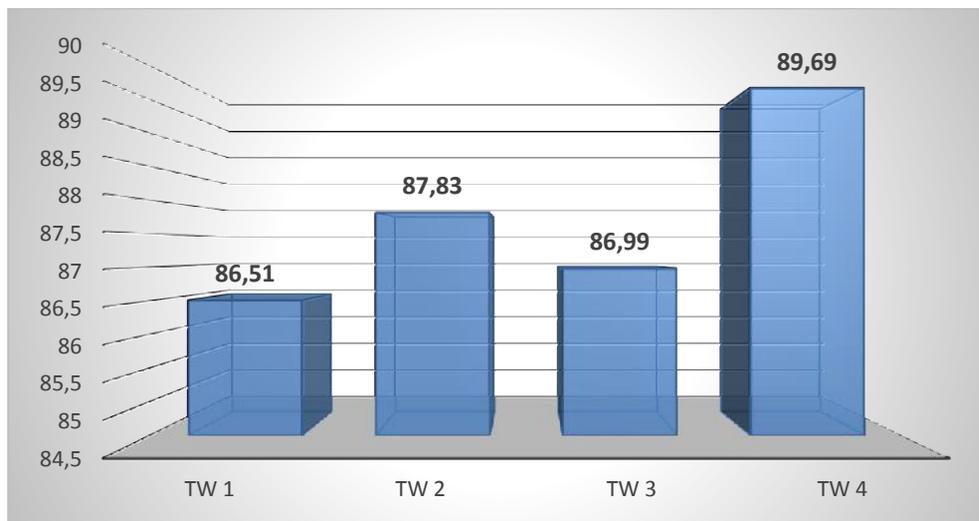
Selama Tahun 2022 jumlah aduan yang masuk ke Dinas Gulkarmat sebanyak 248 laporan dan keseluruhan laporan dapat langsung ditindaklanjuti. Secara total capaian penyelesaian pengaduan masyarakat kepada Disgulkarmat sebesar 100%.

**SASARAN 20: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat**

Survei Kepuasan Masyarakat

Survey kepuasan masyarakat merupakan amanat PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang minimal dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Dinas Gulkarmat selaku unit penyelenggara pelayanan publik melaksanakan survey kepuasan masyarakat sebanyak empat kali dalam satu tahun dengan periode tiga bulanan. Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Disgulkarmat per triwulan adalah sebagaimana Gambar 3.4.

Gambar 3. 4 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Disgulkarmat Tahun 2022 Triwulan 1-4



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

Secara keseluruhan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Disgulkarmat menunjukkan tren positif dengan adanya hasil yang fluktuasi di awal tahun sampai pertengahan tahun, lalu peningkatan dari triwulan 3 ke triwulan 4 mengalami peningkatan. Target yang ditetapkan oleh Provinsi DKI Jakarta untuk masing-masing perangkat daerah adalah 88,50 dan di akhir tahun Disgulkarmat dapat mencapai target tersebut, dengan realisasi 89,69.

**SASARAN 21: Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)**

Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) diperoleh dengan Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima Tahun 2005 dan seterusnya dikali 100%. Realisasi Digulkmart pada kinerja ini adalah 100% keseluruhan TLHP BPK telah selesai ditindaklanjuti

**3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun sebelumnya**

Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap target dan realisasi tahun 2022 serta realisasi tahun sebelumnya diperoleh data pada tabel 3.10 sebagai berikut

**Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Tahun 2018-2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja														
				2018			2019			2020			2021			2022		
				T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
1	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (komposit damkar)	indeks	1,4	1,3	96%	1,7	1,6	94%	2,2	1,7	76%	N/A	2,07	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Menurunnya RW rawan kebakaran	Jumlah RW rawan kebakaran	buah	156	172	36%	131	172	69%	106	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	Tingkat kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	indeks	5.2	5.19	100%	5,9	5,79	98%	6,59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Menurunnya rata-rata jumlah bangunan perumahan yang terbakar pada kejadian kebakaran di kawasan permukiman	Rata-rata jumlah bangunan yang terbakar tiap kejadian kebakaran di kawasan permukiman	bangunan	3.04	2.25	126%	2,95	2,91	101%	2,86	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Meningkatnya pelayanan operasi penyelamatan	Waktu rata-rata operasi penyelamatan	menit	120	107	112%	110	93	118%	100	95	105%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Meningkatnya maturitas pengendalian internal Dinas	Tingkat Maturitas Dinas	indeks	3,1	3,06	99%	3,2	3,06	96%	3,3	3,06	93%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	jiwa/ kejadian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,3	5,62	123,0%	7,1	5	130%
9	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	skor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,8	5,97	102,93%	6,2	6,77	109%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	100	89,4	89%	100	93.79	93,80%	100	99,8	99,78%	91	99,40	109,23%	91	99,48	109%

Tabel 3.10 merupakan rekapitulasi target dan realisasi seluruh IKU baik yang ada di Renstra 2017-2022 dan pada Dokumen Draft Perubahan Renstra Tahun 2017-2022. Penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah pada tahun 2018-2020 belum mengikuti cascading kinerja yang seharusnya, oleh karena itu terjadi perubahan perkin perangkat daerah dari tahun ke tahun. Perbedaan tersebut dikarenakan kebijakan yang diambil oleh Provinsi DKI Jakarta pada saat penyusunan perkin perangkat daerah. Selain itu belum matangnya konsep cascading kinerja pada saat penyusunan Renstra 2017-2022 menyebabkan belum jelasnya beban kinerja kepala perangkat daerah hingga jabatan eselon 3 dan 4 dibawahnya.

Mengingat beberapa perubahan tersebut Disgulkarmat tetap menghitung kinerja sasaran Renstra 2017-2022 yang telah ditetapkan. Semenjak tahun 2021 IKU perangkat daerah bersumber dari Draft Dokumen Perubahan Renstra 2017-2022.

### **3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022**

Program yang menunjang Bidang Kebakaran yang merupakan Urusan Wajib ada 3 (tiga) program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 telah mengikuti Draft Dokumen Perubahan Renstra 2017-2022 yang merujuk pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1.197.894.830.275,- yang terbagi menjadi dua yaitu anggaran Belanja Pegawai yaitu anggaran yang digunakan untuk membayarkan gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 721.681.657.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar 97,59% dan anggaran Belanja Program yaitu anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program yang ditargetkan sebesar Rp. 491.794.368.330,- dengan persen realisasi penyerapan sebesar 92,52%. Secara keseluruhan realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 mencapai 95,51%.

Tabel 3. 11 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Realisasi Anggaran tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program Pendukung	APBD	APBD-P	Realisasi	(%)
1	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	130%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Tingkat Provinsi)	367.915.086.186	198.233.917.507	184.208.639.496	92,9%
2	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	109%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Tingkat Kota)	177.604.998.086	169.249.342.056	162.220.244.639	95,8%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	109%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	764.915.068.545	769.259.494.297	744.202.773.576	96,7%
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	67.450.814.372	61.152.076.415	53.452.539.964	87,4%
RATA-RATA			116,03%	TOTAL	1.377.885.967.189	1.197.894.830.275	1.144.084.197.675	95,5%

Pencapaian Sasaran strategis Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya dan sasaran strategis Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang merupakan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang didukung oleh satu program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 367.483.259.563,- dengan persen realisasi mencapai 94,27% sedangkan capaian sasarnya mencapai 119 %.

Pencapaian Sasaran ke-3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel didukung oleh 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 769.259.494.297,- dengan persen realisasi mencapai 96,7% dan Program Program Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp 61.152.076.415,- dengan persen realisasi mencapai 87,4% sedangkan capaian sasaran tersebut mencapai 109%.

### 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

Sebelum kita membahas efisiensi sumber daya tahun 2022, maka kita harus tinjau perjalanan sinkronisasi antara anggaran dan kinerja dimasa pandemi. Anggaran belanja langsung yang ditujukan untuk pencapaian sasaran/program pada penetapan APBD tahun 2022 sebesar Rp 1.377.885.967.189,- dengan 3 sasaran yang akan dicapai sebagaimana Tabel 3.12.

## Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022

Tabel 3. 12 Perbandingan Anggaran pada APBD TA 2022 dengan APBD-P TA 2022

No	Sasaran Strategis	Program Pendukung	Anggaran Penetapan	Anggaran APBD-P 2022	Jumlah pengurangan	% Pengurangan Anggaran
1	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	545.520.084.272	367.483.259.563	178.036.824.709	33%
2	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan					
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	764.915.068.545	769.259.494.297	(4.344.425.752)	-1%
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	67.450.814.372	61.152.076.415	6.298.737.957	9%
		<b>TOTAL</b>	<b>1.377.885.967.189</b>	<b>1.197.894.830.275</b>	<b>179.991.136.914</b>	<b>13%</b>

Tabel 3. 13 Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian IKU

No	Sasaran	IKU	Capaian Kinerja 2022			Anggaran Penetapan APBD 2022	Anggaran pada APBD-P 2022			Pengurangan Anggaran dari APBD ke APBD-P 2022	Jumlah efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (R/T)	Target	Target	Realisasi	Capaian (R/T)		
1	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	7,1	5	130%	367.915.086.186	198.233.917.507	184.208.639.496	92,92%	169.681.168.679	14.025.278.011
2	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	6,2	6,77	109%	177.604.998.086	169.249.342.056	162.220.244.639	95,85%	8.355.656.030	7.029.097.417
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	99	109%	832.365.882.917	830.411.570.712	797.655.313.540	96,06%	1.954.312.205	32.756.257.172
<b>TOTAL</b>					<b>116,03%</b>	<b>1.377.885.967.189</b>	<b>1.197.894.830.275</b>	<b>1.144.084.197.675</b>	<b>95,5%</b>	<b>179.991.136.914</b>	<b>53.810.632.600</b>

Awal tahun 2022 pandemi covid-19 masih terjadi yang mengakibatkan kontraksi ekonomi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melaksanakan penyempurnaan anggaran untuk penanganan covid-19. Oleh karena itu terjadilah pengurangan anggaran sebesar Rp 179.991.136.914,- pada anggaran perubahan Tahun 2022. Namun dengan adanya pengurangan anggaran tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk tidak merubah kinerja tahun 2022. Pada tabel 3.12 diketahui bahwa pengurangan anggaran dengan nilai terbesar terjadi pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan pengurangan anggaran sebesar Rp 178.036.824.709,-.

Tabel 3. 14 Analisis Penggunaan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Anggaran yang diperlukan untuk mencapai target kinerja 3 sasaran Rp 1.377.885.967.189,-	Anggaran yang disediakan untuk mencapai target kinerja sasaran yang sama Rp 1.197.894.830.275,-	Pengurangan anggaran sebesar Rp 179.991.136.914,- setara dengan 13% dari anggaran awal.	Melakukan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan melakukan inovasi sehingga meminimalisir penggunaan anggaran. Sehingga secara keseluruhan capaian indikator sasaran <b>104,08%</b>

Dalam pembahasan efisiensi akan dibandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian serapan anggaran. Dimana sisa anggaran disebut sebagai efisiensi jika target kinerjanya mencapai 100% atau mendekati. Pada tabel 3.13 diketahui bahwa sasaran ke 1, 2 dan 3 memiliki capaian yg melebihi 100% sehingga sisa anggaran pada program yang menunjang sasaran tersebut dikatakan sebagai efisiensi. Pada tabel 3.12 dijelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat pengurangan anggaran sebesar 13% sementara target kinerja tetap dan dapat dijalankan dengan capaian kinerja 116,03%. sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh sisa anggaran sebesar 179.991.136.914 dapat dikatakan sebagai efisiensi karena kinerja dapat tercapai.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Disgulkarmat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib bidang kebakaran pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) sasaran strategis, capaian sasaran strategis telah menunjukkan capaian yang Sangat Tinggi dengan capaian rata-rata sasaran strategis mencapai 108%, walaupun ada 1 Indikator Kinerja yang tidak mencapai target yaitu Indikator Persentase Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran dengan target 100% dan realisasi 99,8%.

Permasalahan yang menyebabkan Indikator Kinerja tersebut tidak tercapai adalah karena kurangnya kesiapan operasional petugas pemadam kebakaran dalam mencapai response time 15 menit dan juga kesiapan petugas untuk segera memadamkan kebakaran secepat mungkin. Semakin cepat response time (waktu yg diperlukan dari terima laporan sampai dengan unit pertama sampai ke lokasi kejadian kebakaran) maka semakin cepat pula langkah antisipasi yang bisa dilakukan sehingga kebakaran tidak meluas dan meminimalisir warga yang terdampak kebakaran.

Ditengah masa transisi akibat pandemi covid-19 seluruh anggaran dilakukan penyempurnaan dalam rangka memaksimalkan anggaran dan penanganan covid-19, hal tersebut menyebabkan anggaran Disgulkarmat mengalami pengurangan sebesar 13% untuk menyelesaikan target indikator kinerja utama di tahun 2022 yang sama dengan penetapan awal. Dengan pengurangan anggaran tersebut Disgulkarmat mampu mencapai target indikator kinerja rata-rata sebesar 104,08%. Oleh karena itu seluruh sisa anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan sebagai efisiensi.

Secara keseluruhan tugas fungsi Disgulkarmat dapat dilaksanakan dengan baik dengan beberapa prestasi diantaranya, mempertahankan penurunan frekuensi kebakaran dengan jumlah frekuensi kebakaran di Tahun 2022 sebanyak 1691 kejadian. Selain itu dalam menghadapi berbagai kendala pelaksanaan kegiatan yang dibatasi oleh anggaran dan juga masih dilarangnya proses berkumpul dengan masyarakat, maka munculah inovasi-inovasi pelaksanaan kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat pada proses sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan melalui pengeras suara tempat ibadah dan hal tersebut berjalan pada 36.600 titik di seluruh DKI Jakarta.

Penyusunan rencana kinerja Tahun 2022 telah mengikuti Draft Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 walaupun secara keabsahan Perubahan Renstra belum memiliki dasar hukum karena usulan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 belum disahkan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja, antara lain:

- a) Penetapan perjanjian kinerja perangkat daerah sebaiknya mempedomani dokumen perencanaan yang sah sehingga tidak terjadi kebingungan dasar kinerja yang harus dicapai.
- b) Diperlukan kebijakan yang konsisten di semua lini baik perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan terhadap capaian kinerja maupun efisiensi anggaran.
- c) Diperlukan konsistensi dalam penyusunan perjanjian kinerja setiap tahunnya yang berdasarkan Renstra sehingga dapat dilihat perkembangan dari setiap target kinerja utama dari tahun ke tahun.
- d) Meningkatkan sinergitas, koordinasi, komunikasi dan kerjasama baik internal Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan maupun dengan stakeholder dalam mencapai target sasaran dan program.
- e) Melakukan Evaluasi berkala guna mengoptimalkan fungsi pengendalian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk memastikan pencapaian sesuai target.

#### 4.3 Tindak Lanjut

Kami menyadari bahwa kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini masih belum sempurna, untuk itu kedepannya akan disusun Renstra sesuai dengan regulasi yang telah ada sehingga cascading kinerja yang bermula dari kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kinerja Perangkat Daerah termasuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berikut jajaran Pejabat Eselon didalamnya dapat dilaksanakan dengan lebih terarah.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi diatas diharapkan mendukung kebijakan terutama dalam penyusunan perencanaan kinerja yang bersifat lebih elaboratif dan operasional untuk pencapaian tujuan menjadikan Kota Jakarta yang aman.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA**

**TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SATRIADI GUNAWAN

Jabatan : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2022

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Penanggulangan  
Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

SATRIADI GUNAWAN  
NIP. 197111181991011001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Satriadi Gunawan  
 NIP : 197111181991011001  
 Jabatan : Kepala Dinas  
 Unit Kerja : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	1	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	e-SAKIP	<p>Definisi:                      Jumlah jiwa terdampak adalah jumlah warga negara yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial.                      Semakin kecil jumlah jiwa terdampak maka capaiannya semakin baik.</p> <p>Metode Pengukuran:                      Jumlah jiwa yang terdampak kebakaran dibagi dengan jumlah kejadian kebakaran</p> <p>Sumber Data :                      Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</p>	7,25	7.2	7.15	7.1	7.1	jiwa/kejadian
2	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	1	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	e-SAKIP	<p>Definisi:                      Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan meliputi kesiapsiagaan aparatur, kesiapsiagaan sarana, kesiapsiagaan prasarana, kesiapsiagaan masyarakat</p> <p>Metode Pengukuran:                      (1) kesiapsiagaan aparatur (bobot 50%), dengan pengukuran persentase rata-rata kompetensi petugas berdasarkan Diklat Damkar 1, Diklat Fire Rescue, dan Diklat MFR;                      (2) kesiapsiagaan sarana (bobot 20%), dengan pengukuran persentase mobil pompa dalam kondisi baik;                      (3) kesiapsiagaan prasarana (bobot 15%) dengan pengukuran persentase Kelurahan yang memiliki pos/sector pemadam;                      (4) kesiapsiagaan masyarakat (bobot 15%), dengan pengukuran persentase RW yang telah mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.                      Cara perhitungan : ((50% x kesiapsiagaan aparatur) + (20% x kesiapsiagaan sarana) + (15% x kesiapsiagaan prasarana) + (15% x kesiapsiagaan masyarakat)) dibagi 10</p> <p>Sumber Data :                      Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</p>	N/A	N/A	N/A	6.2	6.2	Skor

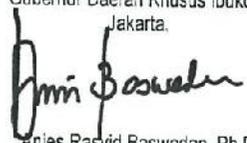
3	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	2	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan	e-SAKIP	<p>Definisi: Mengukur kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan Provinsi DKI Jakarta, dengan menggunakan parameter : SDM (50%), Sarana dan Prasarana (35%) serta Kesiapsiagaan Masyarakat (15%) di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.</p> <p>Metode Pengukuran: Bobot Dinas Gulkarmat dalam tiap parameter sebesar: SDM 50%, Sarana dan Prasarana 50% serta Kesiapsiagaan Masyarakat 50%</p> <p>1. SDM: <math>\frac{\text{Persentase petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang kompeten (petugas yang telah mengikuti 3 diklat (Damkar I, Medical First Responder, dan Fire Rescue / jumlah pegawai Dinas Gulkarmat x 100\%) x Bobot SKPD x Bobot parameter}}{10}</math></p> <p>2. Sarana dan Prasarana: - <math>\frac{\text{Persentase mobil pompa dalam kondisi laik (usia dibawah 15 tahun dan kondisi baik)/jumlah mobil pompa keseluruhan x 100 \% x Bobot SKPD x Bobot parameter}}{10}</math> - <math>\frac{\text{Jumlah kelurahan yang memiliki pos/sector pemadam / jumlah kelurahan Prov. DKI Jakarta x 100 \% x Bobot SKPD x Bobot parameter}}{10}</math></p> <p>3. Kesiapsiagaan Masyarakat: <math>\frac{\text{Persentase RW yang sudah tersosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di DKI Jakarta ((jumlah RW yang sudah tersosialisasi / jumlah RW di Prov. DKI Jakarta) x Bobot SKPD x Bobot parameter)}}{10}</math></p> <p>Sumber Data : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</p>	N/A	N/A	N/A	1.9	1.9	Indeks
4	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran	e-SAKIP	<p>Definisi: Persentase capaian SPM Sub Urusan Kebakaran yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Metode Pengukuran: (Konsolidasi Lokasi) <math>\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Petugas Dinas Damkar dan Relawan Damkar dibagi jumlah kejadian kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dikali 100\%}}{100}</math></p> <p>Sumber Data : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</p>	100	100	100	100	100	Persen

5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Definisi:            Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran <math>\geq 30\%</math>. Apabila serapan anggaran di bawah <math>&lt; 30\%</math> maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>1. Serapan Anggaran <math>\geq 30\%</math> dan output 100%            Realisasi = <math>(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)</math></p> <p>2. Serapan Anggaran <math>&lt; 30\%</math> dan output <math>\leq 100\%</math>            Realisasi = <math>(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)</math></p> <p>3. Serapan Anggaran <math>\geq 30\%</math>, namun output <math>\leq 100\%</math>            Realisasi = <math>(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)</math></p> <p>Sumber Data:            Sistem eMonev dan eSAKIP (dicilah)</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
6	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah Nomor (67)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah Nomor (67)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)	N/A	N/A	100%	100%	100%	Persentase
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase

9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
<b>Sasaran Khusus</b>											
10	Meningkatnya kewaspadaan atas bahaya kebakaran pada gedung-gedung bertingkat	1	Persentase bangunan gedung terinspeksi dan mendapatkan rekomendasi teknis	e-Kinerja	Jumlah gedung di wilayah koridor utama yang mendapatkan rekomendasi teknis Sertifikat Keselamatan Kebakaran / Jumlah gedung di koridor utama yang direncanakan untuk dilakukan inspeksi keselamatan kebakaran dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
11	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<b>Formula Pengukuran :</b> Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order  <b>Sumber Data :</b> Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Mekan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfo menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <8 jam. d) Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.  Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi <i>editorial plan</i> sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis ( <i>draft press release</i> dan data pendukung) dalam kurun waktu <8 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat

15	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	<p><b>Defenisi :</b> Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.</p> <p><b>Formulasi Pengukuran:</b> Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = &gt;90-100; A = &gt;80-90; BB = &gt;70-80; B = &gt;60-70; CC = &gt;50-60; C = &gt;30-50; D = 0-30</p> <p><b>Sumber Data :</b> Lembar Kerja Evaluasi PMPRB</p>	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai
16	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e-office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Birc KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase
<b>Sasaran Operasional</b>											
18	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
19	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
20	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	Indeks
21	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta.

  
Anies Baswedan, Ph.D

Jakarta, Februari 2022  
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran  
dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta,

  
Satriadi Gunawan  
NIP 197111181991011001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
INSPEKTORAT

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon 3822263 Fax. 3813523  
Website : <http://inspektorat.jakarta.go.id> E-mail : [inspektorat@jakarta.go.id](mailto:inspektorat@jakarta.go.id)  
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor : 3417/PA.02.02  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Evaluasi atas  
Implementasi SAKIP  
Perangkat Daerah  
Tahun 2022

26 Desember 2022

Kepada  
Yth. Pj. Gubernur Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
di  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat sebagai evaluator telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2021 yang dilaksanakan di Tahun 2022 pada 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan seluruh Perangkat Daerah lebih berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan sebagai dukungan implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas implementasi SAKIP agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Inspektorat bertanggung jawab untuk memberikan nilai/predikat atas implementasi SAKIP Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan melalui wawancara dengan *Liasion Officer* (LO) masing-masing Perangkat Daerah dan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur evaluasi berdasarkan pemenuhan pernyataan pada Lembar Kerja Evaluasi.

Inspektorat yakin bahwa seluruh dokumen yang disampaikan Perangkat Daerah adalah cukup dan tepat sebagai dasar evaluasi dan menyatakan nilai/predikat bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih capaian nilai rata-rata **93,79** (predikat **AA**).

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat rata-rata efektivitas dan efisiensi dengan komponen evaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal serta telah menunjukkan hasil yang sangat baik dan meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai rata-rata **92,94** (predikat **AA**).

Adapun hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	
		Tahun 2022	
		Nilai	Predikat
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	97,56	AA
2	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	97,11	AA
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	96,81	AA
4	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	96,68	AA
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	96,66	AA
6	Kota Administrasi Jakarta Pusat	96,66	AA
7	Kota Administrasi Jakarta Timur	96,41	AA
8	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	96,26	AA
9	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	96,01	AA
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	95,31	AA
11	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	95,31	AA
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	95,01	AA
13	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	94,41	AA
14	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	94,41	AA
15	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	94,41	AA

No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	
		Tahun 2022	
		Nilai	Predikat
16	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	94,26	AA
17	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	93,51	AA
18	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	93,51	AA
19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	93,51	AA
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	93,51	AA
21	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	93,51	AA
22	Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	92,91	AA
23	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	92,91	AA
24	Kota Administrasi Jakarta Selatan	92,91	AA
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	92,91	AA
26	Kota Administrasi Jakarta Utara	92,91	AA
27	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	92,91	AA
28	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	92,71	AA
29	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	92,61	AA
30	Dinas Pertamanan dan Kehutanan Kota Provinsi DKI Jakarta	92,45	AA
31	Badan Pembinaan dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	92,35	AA
32	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta	92,30	AA
33	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	92,01	AA
34	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta	92,01	AA
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	91,91	AA
36	Kota Administrasi Jakarta Barat	91,66	AA
37	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	91,56	AA
38	Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta	91,56	AA
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	91,56	AA
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	91,26	AA
41	Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	91,11	AA
	<b>Nilai Rata-Rata</b>	<b>93,79</b>	<b>AA</b>

Secara umum beberapa catatan penting atas komponen evaluasi implementasi SAKIP dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%)

Berdasarkan hasil evaluasi rata-rata capaian untuk komponen Perencanaan Kinerja pada Perangkat Daerah memperoleh bobot 29,37%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja masih sama dengan target tahun lalu, sehingga tidak realistis dalam mendukung capaian target pembangunan daerah.

2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%)

Berdasarkan hasil evaluasi rata-rata capaian untuk komponen Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah memperoleh bobot 29,83%. Hal ini menunjukkan pada umumnya Perangkat Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja belum menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. informasi dalam laporan kinerja tahun sebelumnya belum ada perbandingannya
- b. penjelasan atas hambatan dan dukungan ataupun strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah
- c. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang terdapat dalam dokumen Renstra dan Revisi Renstra sudah memenuhi kriteria SMART, namun kualitas indikator tujuan masih harus ditingkatkan, khususnya terkait tingkat kecukupan indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan.

3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)

Berdasarkan hasil evaluasi rata-rata capaian untuk komponen Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah memperoleh bobot 12,95%. Dalam Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah pada umumnya belum menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
- b. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
- c. Laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
- d. Draft Laporan Kinerja direviu di lingkup Perangkat Daerah
- e. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah
- f. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

#### 4. Evaluasi Internal (Bobot 25%)

Berdasarkan hasil evaluasi rata-rata capaian untuk komponen Evaluasi Internal dengan bobot capaian 21,62%. Hal ini dikarenakan bahwa seluruh Perangkat Daerah belum melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang di lingkup Perangkat Daerah.

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat telah menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam Penentuan target kinerja tahunan agar ditentukan berdasarkan kemampuan riil Perangkat Daerah dan juga menyesuaikan dengan informasi yang tercantum dalam laporan kinerja tahun sebelumnya, terutama dalam pencapaian target pembangunan daerah sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah;
2. Pengukuran kinerja agar disusun berdasarkan informasi dalam laporan kinerja, sehingga mengetahui target yang riil yang akan dicapai serta hambatan dan dukungan ataupun strategi yang harus disusun Perangkat Daerah miliki dalam rangka mencapai kinerja tersebut;
3. Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah agar dilengkapi dengan :
  - a. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), apabila tidak ada perbandingan dengan level nasional agar diinformasikan di dalam bagian di LAKIP
  - b. Analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
  - c. Laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dengan cara Melengkapi keseluruhan tindak lanjut atas saran dan rekomendasi dalam LAKIP
  - d. Perangkat Daerah telah melakukan reuiu laporan kinerja di lingkup Perangkat Daerah
  - e. Analisa dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah
  - f. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

4. Seluruh Perangkat Daerah agar melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang di Lingkup Perangkat Daerah dengan dibentuknya Tim SAKIP di Perangkat Daerah.
5. Terhadap rekomendasi yang telah disampaikan tersebut, seluruhnya telah ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai upaya perbaikan dan dalam rangka meyakini atas implementasi SAKIP.

Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, direncanakan akan diberikan apresiasi terhadap 10 (sepuluh) Perangkat Daerah dengan peringkat tertinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bila Bapak berkenan akan segera diproses perbal draft naskah dinas tersebut.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi periksa.

  
Inspektur Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Syaefulloh Hidayat  
NIP. 197612221998111001

Tembusan :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.



**DISPUSIP**  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



**Jakarta**  
kota kolaborasi

# Sertifikat

Nomor e-0073/KA.01.11

Diberikan Kepada

## Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Terima Kasih atas pengelolaan dan pemeliharaan arsip sehingga mendapatkan kategori BAIK.

Jakarta, 24 Oktober 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

selaku

Kepala Lembaga Kearsipan,



Wahyu Haryadi

NIP 196701151993031005